

Nama: Sela Ayu Irawati
Npm: 2313031015
Kelas: A

JURNAL NASIONAL

1. IDENTITAS JURNAL

Nama Jurnal	:	Jurnal Bisnis dan Akuntansi
Judul Jurnal	:	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Audit Report Lag Pada Perusahaan yang terdaftar di bursa Efek Indonesia
Volume (Nomor)	:	12 (3)
Halaman	:	175 – 186
Tahun	:	2010
Penulis	:	Meylisa Januar Iskandar dan Estralita Tresnawati

2. ANALISIS JURNAL

Audit report lag merupakan jangka waktu antara tanggal tahun buku perusahaan berakhir sampai dengan tanggal laporan audit. Pada dasarnya, untuk menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang relevan, pasti akan terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah ketepatan waktu. Apabila laporan keuangan tidak disajikan tepat waktu maka laporan tersebut akan kehilangan nilai informasinya, karena tidak tersedia saat pemakai laporan keuangan membutuhkannya untuk pengambilan keputusan. Yang mana hal tersebut diatur di dalam PSAK tahun 2007 pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 43, yaitu bahwa jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Menurut pendapat saya, hal tersebut bisa terjadi karena adanya perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan

auditor independen yang mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Yang mana perbedaan waktu tersebut sering disebut audit report lag. Semakin panjang suatu audit report lag, maka akan memberikan dampak negatif. Lamanya waktu penyelesaian proses audit (audit report lag) akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam publikasi informasi laporan keuangan audit. Keterlambatan dalam publikasi informasi laporan keuangan akan berdampak pada tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan. Ketetapan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum tergantung dari ketetapan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya (audit report lag).

Pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan diakui oleh berbagai pihak yang berkepentingan karena hal tersebut bukan hanya berpengaruh pada nilai dan kualitas laporan keuangan tersebut namun juga membawa reaksi yang negatif dari pasar. Dilema tersebut menyebabkan kemungkinan akan adanya reputasi auditor yang bisa saja jatuh akibat terlalu lamanya seorang auditor mengeluarkan laporan keuangan yang telah diauditnya sehingga para pemakai laporan keuangan ragu akan kualitas informasi yang dipublikasikan. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya audit report lag, baik dari segi internal perusahaan maupun dari segi eksternal. Banyak faktor yang mempengaruhi audit report lag yaitu profitabilitas, solvabilitas, struktur kepemilikan, laba rugi dan ukuran perusahaan.

Profitabilitas merupakan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profit merupakan berita baik bagi perusahaan. Perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik. Profitabilitas tersebut mempunyai pengaruh dalam publikasi laporan keuangan. Namun yang saya lihat, pada jurnal tersebut bahwasannya perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah atau dengan kata lain mengalami kerugian cenderung akan menunda publikasi atas laporan keuangan karena kerugian merupakan kabar buruk yang akan berdampak negatif pada Perusahaan

seperti penurunan permintaan akan saham. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi membutuhkan waktu dalam pengauditan laporan keuangan lebih cepat agar segera dapat memberitahukan kabar baik kepada publik dan mendapatkan respon yang positif dari publik. Maka dari itu, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan tersebut.

Kemudian, faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi audit report lag pada suatu perusahaan adalah struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan tersebut dibagi menjadi dua yaitu kepemilikan oleh pihak dalam negeri dan kepemilikan oleh pihak luar negeri. Perusahaan yang kepemilikannya di pegang pihak luar negeri akan cenderung lebih bertanggung jawab terhadap laporan keuangannya. Perusahaan pastinya akan berusaha mempertahankan reputasinya agar pihak luar tetap mau menanamkan dananya. Perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki sistem dan fasilitas yang lebih baik sehingga memudahkan auditor dalam proses auditnya. Karena yang saya lihat, pola pikir perusahaan asing dianggap lebih maju sehingga akan mempengaruhi kinerja pekerjanya. Kinerja pekerjanya yang baik akan memperkecil kemungkinan audit report lag karena auditor dapat terbantu dengan internal control yang ada.

Menurut pendapat saya, ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan juga merupakan hal yang sangat penting khususnya untuk perusahaan- perusahaan publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Namun auditor juga memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan bukti bukti kompeten yang akan mendukung opininya. Rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Audit report lag akan lebih panjang pada perusahaan yang mendapatkan qualified opinion dan qualified opinion dapat dilihat sebagai bad news dan akan memperlambat proses audit. Terdapat

kemungkinan konflik antara auditor dengan perusahaan, dimana akan menunda penerbitan laporan keuangan dan audit report lag lebih panjang dialami oleh perusahaan yang menerima pendapat qualified opinion.

JURNAL NASIONAL

1. IDENTITAS JURNAL

Nama Jurnal	:	Jurnal Multiparadigma Akuntansi
Judul Jurnal	:	Pengaruh Standar Auditing, Standar Pengendalian Mutu, dan Kode Etik Terhadap Kualitas Jasa Audit
Volume (Nomor)	:	3(1)
Halaman	:	386 – 392
Tahun Terbit	:	2021
Nama Penulis	:	Nur Afriani Destyani dan Hendang Tanusdjaja

2. ANALISIS JURNAL

Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:44) mendefinisikan auditing merupakan jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor bukan dimaksudkan mencari penyimpangan atau kesalahan meskipun dalam proses pemeriksaan kemungkinan besar ditemukan penyimpangan atau kesalahan. Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Standar auditing merupakan klasifikasi atau ukuran mutu kinerja dan berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur atau langkah-langkah tersebut. Standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standarpelaporan beserta interpretasinya. Standar–standar tersebut sering berhubungan dan saling

tergantung satu sama lain. Materialitas dan risiko audit melandasi penerapan semua standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

Auditing, perilaku auditor disebabkan dengan niat untuk mematuhi standar yang berlaku. Direfleksikan oleh standar auditing, standar pengendalian mutu, dan kode etik yang dipatuhi oleh auditor dalam melaksanakan jasa profesionalnya. Hasil dari perilaku yang mengikuti aturan dan standar maka jasa audit menjadi lebih berkualitas.

Kualitas audit menurut para pengguna laporan keuangan merupakan jaminan auditor bahwa tidak ada salah saji yang material (no material misstatements) atau kecurangan (fraud) dalam laporan keuangan auditee. Kualitas audit menurut auditor terjadi apabila mereka bekerja sesuai dengan standar profesional yang ada, dapat menilai risiko bisnis auditee dengan tujuan untuk meminimalisasi ketidakpuasaan auditee dan menjaga reputasi auditor. Standar Pengendalian Mutu memberikan panduan bagi Kantor Akuntan Publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI. Pengendalian mutu KAP harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jasa audit, atestasi, akuntansi, review dan konsultasi yang standarnya telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Kode etik berhubungan dengan perilaku seseorang khususnya auditor dengan menjalankan kode etik sesuai dengan standar akan mewujudkan kualitas jasa audit yang lebih baik. Seorang akuntan profesional harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas.

Kepercayaan masyarakat dan pemerintah atas hasil kerja auditor ditentukan oleh keahlian, independensi serta integritas moral atau kejujuran

para auditor dalam menjalankan pekerjaannya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap satu atau beberapa auditor dapat merendahkan martabat profesi auditor secara keseluruhan, sehingga dapat merugikan auditor lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang akuntan profesional wajib menaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Standar Auditing, Standar Pengendalian Mutu, Dan Kode Etik Terhadap Kualitas Jasa Audit. Maka :

- a) Berdasarkan pengujian variabel standar auditing berpengaruh terhadap kualitas jasa audit karena koefisien regresi sebesar 0,322 dengan dengan nilai signifikansi sebesar 0,005. Nilai ini lebih kecil dari tingkat yang telah ditetapkan yaitu 0,05 maka hipotesis untuk variabel standar auditing dapat diterima.
- b) Variabel standar pengendalian mutu tidak berpengaruh terhadap kualitas jasa audit. Nilai signifikansi sebesar 0,271 lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,005.
- c) Variabel kode etik berpengaruh terhadap kualitas jasa audit dengan nilai signifikansi 0,025 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05 sehingga hipotesis untuk variabel kode etik dapat diterima.

JURNAL NASIONAL

1. IDENTITAS JURNAL

Nama Jurnal	:	Jurnal Akuntansi UMMI
Judul Jurnal	:	Pengaruh Pemeriksaan Internal (Audit Intern) Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal (Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.)
Volume	:	1
Halaman	:	73 - 78
Tahun Terbit	:	2020
Nama Penulis	:	Dena Eka Agustina

2. ANALISIS JURNAL

Dalam persaingan usaha yang semakin kompetitif dan kompleks di era globalisasi saat ini, akan banyak permasalahan dan kendala yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan. Pimpinan dan pihak manajemen berkewajiban untuk dapat mengelola perusahaannya dengan sebaikbaiknya, meskipun pada umumnya segala kegiatan perusahaan tidak dapat diawasi secara langsung oleh pimpinan dan manajer, karena itu para pimpinan dan pihak manajer harus mendelegasikan sebagian tugas, wewenang dan tanggung jawabnya kepada pihak lain. Oleh karena itu, pimpinan dan pihak manajemen memerlukan pengawasan atau pemeriksaan internal dalam usaha meningkatkan pengendalian internal perusahaan yang efektif dan efisien. Penerapan pengendalian internal ini sangat penting karena digunakan perusahaan untuk mengarahkan kegiatan operasional perusahaan, mencegah penyalahgunaan sistem yang diterapkan, dan melindungi asset yang dimiliki perusahaan. Hal ini dikarenakan kurang efektifnya pemeriksaan internal (audit intern) yang dilakukan oleh auditor internal.

Disinilah peran auditor internal (audit intern) diperlukan, karena keberadaannya ditujukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Penelitian

Yusnita dan Yuniasari (2008), Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemeriksaan Intern berpengaruh signifikan terhadap Kontinuitas Usaha. Sedangkan hasil koefisien determinasi yang diperoleh menunjukkan bahwa pemeriksaan intern mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kontinuitas usaha. Widyaningsih (2010), diketahui bahwa terdapat pengaruh yang cukup tinggi antara audit internal terhadap efektivitas pengendalian intern biaya produksi. Miraceti (2011), Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab auditor internal secara individual dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal. Handryanto (2015), Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan independensi kompetensi dan pengalaman kerja auditor internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal.

Pemeriksaan intern timbul karena adanya keterbatasan pimpinan atau manajemen dalam melakukan pengendalian secara langsung. Secara umum pemeriksaan intern dalam melaksanakan tugasnya harus independen yang mana membantu manajemen dalam mencapai operasi dan administrasi perusahaan yang efektif dan efisien. Pemeriksaan internal mempunyai ciri dan fungsi paling dasar yaitu melaksanakan kegiatan menyangkut pembahasan masalah intern organisasi, dengan memberikan kepastian kepada dewan direksi dan manajemen, mengenai hasil evaluasi dan pengujian suatu aktivitas organisasi yang disesuaikan dengan kriteria yang tepat dan memberikan rekomendasi mengenai serangkaian tindakan kepada pihak manajemen. Menurut Agoes (2013:204) mendefinisikan pemeriksaan internal adalah: Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuanketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.

Pemeriksaan intern harus mempunyai kedudukan khusus dalam struktur organisasi perusahaan agar pemeriksaan internal terbebas dan objektif dalam me- review dan menilai berbagai kerja sistem, prosedur dan

catatan perusahaan. Tujuan pemeriksaan intern yaitu membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan melalui pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik (Ivanni dan Khairani).

Dengan adanya pemeriksaan internal (audit intern) yang baik maka akan meningkatkan pula efektivitas pengendalian internal bank. Hal tersebut karena pemeriksaan internal (audit intern) dilakukan guna mengevaluasi kecukupan, efisiensi, efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola bank, sehingga dapat mendorong peningkatan pengendalian internal secara berkesinambungan. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut: H_0 : Pemeriksaan internal (audit intern) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif asosiatif. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen atau bebas (X) yaitu variabel yang menjadi pendugaan dan variabel dependen atau tidak bebas (Y) yaitu variabel yang diperkirakan nilainya. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu: Variabel independen (X) yang digunakan pada penelitian ini adalah pemeriksaan internal (audit intern). Variabel dependen (Y) yang digunakan pada penelitian ini adalah efektivitas pengendalian internal. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bank yang berhubungan dengan pengaruh pemeriksaan internal (audit intern) terhadap efektivitas pengendalian internal, khususnya karyawan di bagian Satuan Pengawas Intern (SPI) atau pejabat yang berfungsi sebagai audit internal pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sukabumi.

JURNAL NASIONAL

1. IDENTITAS JURNAL

Nama Jurnal	:	Jurnal Akuntansi dan Bisnis
Judul Jurnal	:	Pengaruh Fee Audit, Pengalaman Kerja, dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan
Volume	:	3 (2)
Halaman	:	144 - 155
Tahun Terbit	:	2017
Nama Penulis	:	Wan Fachruddin, Sri

2. ANALISIS JURNAL

Akuntan publik disebut sebagai akuntan independen yang memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkan dan mereka bekerja secara bebas tanpa adanya tekanan. Fee audit merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit bagi para auditor. Menurut Mulyadi (2002:63) Besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya .Kompleksitas jasa yang dimaksud adalah kompleksitas perusahaan menyangkut banyaknya anak perusahaan dan jumlah karyawan.

Hanjani dan Rahardja (2014) menyimpulkan bahwa apabila fee audit lebih tinggi maka semakin baik kualitas audit yang dilakukan oleh audito. Berikut merupakan sebagian kasus terkait dengan fee audit seorang auditor. Pada akhir tahun 2009, IAPI meminta KPU untuk menaikkan fee audit akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye tahun 2009. Dalam aturan KPU, fee audit untuk tingkat kabupaten per partai Rp 10.000.000,dan tingkat provinsi Rp 20.000.000,-. Anggota Dewan Pengurus IAPI, M.

Achsin menilai bahwa dipastikan terdapat keengganan dari Akuntan Publik untuk melakukan audit dana kampanye tersebut. Adanya kasus tersebut mengindikasikan bahwa besaran fee audit yang diberikan kepada akuntan publik mempengaruhi penerimaan tuga audit dari kliennya. Pengalaman kerja juga dipandang sebagai suatu faktor penting dalam menunjang kualitas audit seorang auditor, merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seorang kepada pola tingkah laku yang lebih tinggi (Knoers dan Haditono dalam Susmiyanti 2016). Pengalaman kerja dianggap sebagai faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor dalam hal ini yaitu kualitas auditnya. Telekomunikasi Indonesia yang melibatkan Kantor Akuntansi Publik (KAP) Hryanto Sahari dan Rekan akan tetapi karena ada sesuatu hal KAP tersebut mundur dan digantikan oleh Kantor Akuntansi Publik (KAP).

Keterlambatan tersebut diakibatkan karena, KAP Haryanto Sahari dan Rekan melakukan penolakan atas izin sebagai first layer. Penolakan tersebut membuat KAP Drs. Independensi akuntan publik sangat diperlukan, karena dengan menjaga independensinya ini artinya kualitas yang diharapkan akan tercapai. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, audit yang dilaksanakan auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan dan standar pengauditan. Standar pengauditan tersebut mencakup mutu professional auditor, independensi, pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Jadi seorang auditor dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas jika auditor tersebut melaksanakan pekerjaannya secara professional.

Salah satu kasus tentang pelanggaran kode etik profesi yang menyangkut independensi auditor yang terjadi di kota Medan adalah kasus pengadilan Tripikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan yaitu kasus Kepala Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M Yasin & Rekan. Nilai kerugian ini sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut. Hal inilah yang

membuat perilaku etis auditor pada situasi konflik audit diragukan banyak pihak karena tidak mematuhi etika profesi dan standar auditing sebagai akuntan publik. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menentukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Rapina dkk, 2010).

Dalam menilai kualitas audit melibatkan banyak pertimbangan, kualitas yang baik akan menunjang kinerja bahkan mampu mendongkrak etika perusahaan di mata masyarakat. Adapun pernyataan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik. Seperti kasus yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang diindikasikan melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Great River Internasional, Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan account penjualan, piutang dan asset hingga ratusan miliar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal membayar utang.

JURNAL NASIONAL

1. IDENTITAS JURNAL

Nama Jurnal	:	Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA)
Judul Jurnal	:	Analisis Audit Operasional Persediaan Barang dagang (Kasus Pada LPG Non Subsidi Pada PT Harapan Panca Sukma – Bandar Lampung)
Volumr	:	4 (2)
Halaman		81 - 93
Tahun Terrbit	:	2021
Nama Penulis	:	Novalita dan Siti Rahmiati

2. ANALISIS JURNAL

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat pelaksanaan audit operasional atas persediaan barang dagang di PT. Harapan Panca Sukma dan melihat temuan dan rekomendasi yang diperoleh dari audit operasional terhadap persediaan barang dagang PT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum sudah dilaksanakan audit operasional persediaan barang dagang terhadap pemasukan dan pengeluaran barang tetapi ada persediaan barang yang overstock.

Manusia dihadapkan pada suatu kenyataan dalam kehidupan dituntut untuk berupaya memenuhi kebutuhan hidup yang bermacam-macam baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tersier. Setiap perusahaan selalu memerlukan persediaan dalam rangka menjaga kontinuitas produksi, tanpa adanya persediaan perusahaan akan dihadapkan pada resiko bahwa perusahaannya suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan konsumen (Rangkuti, 2007). Pada perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor, persediaan menjadi salah satu komponen penting dalam kegiatan penjualan. Kegiatan penjualan perusahaan akan terus berlangsung selama perusahaan

memiliki persediaan yang cukup. Terjadinya kekurangan persediaan selain dapat menghentikan kegiatan perusahaan juga dapat mengakibatkan konsumen untuk beralih mencari produk sejenis pada perusahaan lain, sehingga dapat mengurangi kesempatan perusahaan untuk memperoleh laba, sebaliknya jika perusahaan memiliki persediaan yang cukup besar, perusahaan dapat memenuhi seluruh permintaan yang ada. Sedangkan persediaan yang terlalu besar (overstock) dapat melipatgandakan beban biaya persediaan selama penyimpanan di gudang..

(Gunawan dan Rizky : 2018) Mengingat pentingnya persediaan barang dagang tersebut, maka manajemen membutuhkan suatu audit operasional yang dapat mengamankan aktivitas persediaan barang pada PT. Harapan Panca Sukma, supaya tidak kekurangan stok persediaan barang maupun kelebihan stok persediaan barang. Tujuan dari audit operasional itu sendiri akan tercapai apabila semua sistem, prosedur, kebijakan yang telah ditetapkan menjadi unsur dari audit operasional benar- benar efektif. Audit operasional yang baik pada persediaan barang umumnya dicapai melalui pemisahan tugas dan pemisahan wewenang sehingga seseorang dapat melaksanakan suatu transaksi penerimaan dan pengeluaran barang yang lengkap dari awal sampai akhir.

Persediaan merupakan aktiva lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah diselewengkan oleh para pejabat dan karyawan serta setiap harinya bagian kepala gudang PT. Harapan Panca Sukma melakukan penerimaan barang dan pengiriman barang kepelanggan, oleh karena itu persediaan barang dagang harus diawasi dengan benar, baik dari segi penerimaan barang maupun dari segi pengeluaran barang. Audit operasional merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menguji dan menilai kekayaan maka, kebutuhan akan adanya suatu audit operasional dalam penyelenggaraan kegiatan PT. Harapan Panca Sukma. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan mengenai sifat persediaan barang dagang yang penting dan rawan bagi perusahaan maka perlu diadakannya audit operasional terhadap persediaan barang dagang.

Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun Internal Audit. Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang ditentukan. Pengertian Audit Operasional Bayangkara (2013:2) Audit operasional adalah rancangan secara sistematis untuk mengaudit aktivitas- aktivitas, program-program yang diselenggarakan, atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, serta tujuan dari program dan aktifitas yang telah direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan.

Jenis Audit Operasional Menurut Arens dalam Sukrisno Agoes (2013:173) ada tiga jenis operational audit,yaitu : 1. Functional 2. Organizational 3. Special assignments 4. Tujuan Audit Operasional Sukrisno Agoes (2017:184) tujuan audit operasioanal yaitu : 1. Menilai kinerja (performance) dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan. Kualifikasi Auditor Operasional Menurut Arens, Elder dan Beasley (2012:501) dua kualifikasi yang terpenting bagi auditor operasional adalah independensi dan kompetensi. Manajemen Pengendalian Persediaan Untuk mewujudkan persediaan terlaksana secara baik dan stabil maka pihak perusahaan harus menerapkan konsep manajemen persediaan (inventory management).

JURNAL INTERNASIONAL

1. IDENTITAS JURNAL

Nama Jurnal	:	Internasional Journal of Economics, Business, and Accounting Research
Judul Jurnal	:	The Effect Of Audit Opinion, Public Accounting Firm's Size, Company Size, And Company Profitability To Delay Audits In Registered Manufacturing Companies In Indonesia Stock Exchange In 2015-2017
Volume	:	2 (3)
Halaman	:	45 – 50
Tahun Terbit	:	2018
Nama Penulis	:	Wikan Budi Utami, Laksmi Pardanawati, dan Ika Septianingsih

2. ANALISIS JURNAL

Laporan keuangan bermanfaat bagi pemakainya, sehingga laporan keuangan harus memenuhi delapan syarat, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan, memiliki kekuatan pengujian, netral, tepat waktu, dan lengkap. Terdapat beberapa kendala dalam menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang relevan, salah satunya tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Laporan keuangan yang tidak disajikan tepat waktu dapat mengurangi manfaat bagi pihak yang berkepentingan, karena dianggap nilai informasi dalam laporan menjadi kurang relevan dan andal. Jika laporan keuangan tidak disajikan tepat waktu, laporan tersebut akan kehilangan nilai informasinya, karena tidak tersedia pada saat pengguna laporan keuangan membutuhkannya untuk pengambilan keputusan.

Hal ini diatur dalam PSAK 2007 dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 43, yaitu jika terjadi keterlambatan pelaporan yang tidak semestinya, informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Dampak keterlambatan penerbitan laporan audit tidak hanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan berkurangnya relevansi laporan keuangan, tetapi juga mempengaruhi penilaian tata kelola perusahaan yang baik karena dapat merugikan investor dan pemegang saham jika harus mengambil keputusan secara cepat karena informasi yang mereka butuhkan tidak tersedia pada saat itu. Kenyataannya, banyak perusahaan yang masih mengalami audit delay yang tinggi, termasuk perusahaan Manifact yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun inti pembahasan yang dikaji dalam jurnal ini ialah mengenai:

a) Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit Delay

Laporan audit merupakan media yang digunakan auditor dalam mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan yang diaudit kepada pihak yang berkepentingan yang disajikan dalam laporan tertulis. Opini audit yang baik dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan investor sehingga setiap perusahaan selalu memiliki keinginan untuk memperoleh opini audit yang baik atas kewajaran laporan keuangannya.

b) Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Audit Delay Ada dua ukuran KAP yaitu big four dan nonbig four. KAP Big Four memiliki fleksibilitas audit yang lebih tinggi dalam menjadwalkan audit laporan keuangan, hal ini dikarenakan KAP Big Four pada umumnya memiliki sumber daya yang semakin banyak dalam hal kompetensi, keahlian dan kemampuan auditor serta fasilitas, sistem dan prosedur audit.

c) Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay

Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin besar pula modal yang akan ditanamkan oleh investor. Perusahaan besar memiliki

sumber daya untuk membayar biaya audit yang lebih tinggi sehingga pekerjaan audit dapat dilakukan segera setelah akhir tahun buku. Menurut Warren dkk. (2008, 52) aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh item fisik, seperti uang tunai dan perlengkapan, atau tidak berwujud yang memiliki nilai.

d) Pengaruh Profitabilitas Perusahaan terhadap Audit Delay

Setiap investor memiliki keinginan untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, dengan harapan perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas yang tinggi juga akan menghasilkan return yang tinggi. Jika perusahaan memiliki rasio profitabilitas yang tinggi, maka hal tersebut merupakan kabar baik bagi perusahaan dan dapat menarik investor, sehingga perusahaan ingin segera menyampaikan kabar baik tersebut kepada masyarakat melalui laporan keuangan. Jika profitabilitas rendah dan risiko kerugian perusahaan meningkat, auditor akan meningkatkan kehati-hatiannya dalam proses audit untuk memperoleh kepercayaan atas laporan keuangan perusahaan.

e) Pengaruh Opini Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Perusahaan Secara Simultan terhadap Audit Delay

Penerimaan pendapat selain ajar tanpa pengecualian merupakan indikasi adanya konflik antara auditor dengan perusahaan yang pada akhirnya memperpanjang waktu audit. KAP yang profesional biasanya memiliki manajemen audit yang lebih rapi dan terstruktur terutama dalam menangani masalah yang terjadi di lapangan atau jika ada kesulitan dalam mengaudit perusahaan akan lebih cepat dalam menyelesaikan masalah. Perusahaan besar diharapkan menyelesaikan proses audit lebih cepat daripada perusahaan kecil. Hal ini dapat disebabkan oleh pengendalian internal yang baik dan kemampuan perusahaan dalam mendorong auditornya untuk dapat menyelesaikan pekerjaan audit dengan tepat waktu. Jika perusahaan memiliki rasio profitabilitas yang tinggi, maka hal tersebut merupakan kabar baik bagi perusahaan dan dapat menarik investor, sehingga perusahaan ingin

segera menyampaikan kabar baik tersebut kepada masyarakat melalui laporan keuangan.

JURNAL INTERNASIONAL

1. IDENTITAS JURNAL

Nama Jurnal	:	Management and Accounting Review
Judul Jurnal	:	People and Audit Process Attributes of Audit Quality: Evidence from Malaysia
Volume	:	18 (2)
Halaman	:	47 - 79
Tahun Terbit	:	2019
Nama Penulis	:	Noor Adwa Sulaiman, Suhaily Shahimi, Ranjit Kaur Nashtar Singh

2. ANALISIS JURNAL

Studi ini mensurvei dua kelompok auditor eksternal (kelompok 1 - mitra audit dan mitra pengelola dan, kelompok 2 - auditor senior dan junior) untuk membandingkan persepsi mereka tentang orang-orang dan atribut proses audit untuk mencapai kualitas audit. Temuan menunjukkan perbedaan pandangan tentang konsep kualitas audit oleh kedua kelompok auditor. Secara keseluruhan, lima atribut kualitas audit dengan peringkat tertinggi yang dilaporkan paling penting dalam menentukan kualitas audit adalah: kepatuhan terhadap Kontrol Kualitas Standar Internasional (ISCQ) 1, memperoleh bukti audit yang kredibel dan memadai, keahlian teknis tim audit, audit pekerjaan yang memenuhi standar kualitas perusahaan audit, dan kompetensi tim audit. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kedua kelompok responden memiliki pandangan yang berbeda mengenai atribut kualitas audit.

Kelompok 1 dianggap atribut kualitas audit terkait dengan penilaian auditor risiko dan prosedur review kualitas internal dalam perusahaan audit. Kantor akuntan publik mungkin tertarik untuk memahami perbedaan

mendasar tersebut sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas audit dapat berfokus pada atribut utama yang dianggap penting untuk layanan audit berkualitas tinggi. Studi ini penting untuk memperluas literatur tentang kualitas audit. Hal ini juga memberikan masukan yang berguna bagi kantor akuntan publik untuk meningkatkan kualitas audit mereka.

Pertanyaan telah diajukan oleh pemangku kepentingan utama dari jasa audit, apakah auditor telah melaksanakan tanggung jawab mereka dengan rajin dan apakah perusahaan audit memiliki proses audit yang baik saat melaksanakan jasa audit (Carcello, Hermanson & McGrath, 1992; Reilly, 2006; Boone, Khurana, & Raman, 2008). Dengan demikian, perusahaan audit dihadapkan dengan tanggung jawab tambahan ketika menerapkan prosedur pengendalian kualitas untuk menilai sendiri orang-orang dan proses mereka sehingga mereka dapat mengenali kekurangan yang dapat merusak kualitas audit (Sanusi, Isa, Iskandar & Heang, 2014). Penelitian sebelumnya telah mendokumentasikan bahwa kualitas audit berkaitan dengan kualitas orang-orangnya.

Meskipun orang dan proses audit merupakan penentu utama yang mempengaruhi kualitas audit dalam praktiknya, ada bukti empiris terbatas yang menguji dampaknya terhadap kualitas audit dari perspektif mereka yang bertanggung jawab atas jasa audit. Penggunaan penelitian arsip adalah pendekatan yang mapan dalam memeriksa proxy kualitas audit ini. Pendekatan lain telah mempelajari kualitas audit dengan memeriksa penilaian dan keputusan auditor dan 'perilaku disfungsional' yang dapat mengancam kualitas audit menggunakan pendekatan eksperimental atau survei (Lord & DeZoort, 2001; Herrbach, 2001). Studi saat ini konsisten dengan pendekatan perilaku yang terakhir karena berfokus pada persepsi auditor berkaitan dengan kualitas audit dalam praktiknya.

Penelitian ini mencoba mengidentifikasi konsep dan atribut kualitas audit dari persepsi auditor eksternal di Malaysia, dimana dalam RQ2: Apa atribut paling penting dari orang dan proses audit yang mempengaruhi kualitas audit seperti yang dirasakan oleh auditor eksternal?. Secara khusus, penelitian ini memberikan bukti tentang kepentingan relatif orang dan

atribut proses audit dalam mempengaruhi kualitas audit seperti yang dirasakan oleh dua kelompok auditor eksternal (kelompok 1 - mitra audit dan mitra pengelola dan, kelompok 2 - auditor senior dan junior).

Pertama, sementara penelitian tentang orang dapat dianggap sebagai area yang agak 'mapan', penelitian ini juga menguji pengaruh proses terhadap kualitas audit. Sejauh ini, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada proses audit, khususnya pengaruh tinjauan pengendalian kualitas meskipun berbagai peraturan dan regulasi telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas audit melalui proses audit yang efektif (Francis, 2011; Kilgore et al., 2011).

Kedua, penelitian ini mengumpulkan pandangan mengenai atribut yang mempengaruhi kualitas audit dalam praktek dari dua kelompok auditor. Membandingkan pandangan kedua kelompok ini penting karena cara auditor mengkonseptualisasikan atribut yang mempengaruhi kualitas audit pada penugasan audit relevan untuk memahami jasa audit. Penting untuk memahami apa yang dianggap kedua kelompok sebagai kualitas audit yang tinggi mengingat tingkat pengalaman dan pengetahuan mereka yang berbeda.

Ketiga, penelitian ini memberikan wawasan tambahan tentang persepsi auditor eksternal di Malaysia mengenai atribut yang mempengaruhi kualitas audit dalam praktiknya. Hasilnya akan memberikan panduan kepada manajemen perusahaan audit tentang atribut utama yang dirasakan auditor eksternal berkontribusi pada kualitas audit yang tinggi. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas audit dengan meningkatkan orang dan proses untuk memberikan layanan audit berkualitas lebih tinggi.

ARTIKEL BERITA MEDIA MASSA

1. IDENTITAS ARTIKEL

Judul Artikel	:	KPK Periksa Kepala BPK Jabar Soal Pembentukan Tim Auditor Pemkab Bogor
Publikasi	:	Detik News
Tahun	:	2022
Penulis	:	Muhammad Hanafi Aryan
Website	:	https://news.detik.com/berita/d-6086505/kpk-periksa-kepala-bpk-jabarsoal-pembentukan-tim-auditor-pemkabogor

2. ANALISIS ARTIKEL

KPK memeriksa Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Agus Khotib. KPK menanyakan soal proses pembentukan tim auditor untuk memeriksa laporan keuangan Pemkab Bogor di kasus suap Bupati Bogor Ade Yasin. Selain Agus, KPK turut memeriksa setidaknya tiga pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat lain di gedung Merah Putih KPK pada Kamis (19/5). Adapun yang diperiksa antara lain Dessy Amalia selaku PNS BPK Perwakilan Jawa Barat, Winda Rizmayani selaku PNS BPK Perwakilan Jawa Barat, dan Emmy Kurnia selaku PNS BPK Perwakilan Jawa Barat. Ali menambahkan, selain pegawai BPK Perwakilan Jabar, tim penyidik turut memeriksa enam pegawai Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Keenamnya diperiksa terkait dugaan proyek yang pengerjaannya diperiksa oleh tim auditor BPK Perwakilan Jabar. KPK Panggil Kepala BPK Jabar di Kasus Suap Bupati Bogor Ade Yasin.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka di kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. Dia diduga menyuap pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat senilai Rp 1,9 miliar agar Kabupaten Bogor mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP)

untuk tahun 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat. "Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh AY (Ade Yasin) melalui IA (Ihsan Ayatullah) dan MA (Maulana Adam) kepada tim pemeriksa, di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp 10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp 1,9 miliar," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di KPK, Kamis (28/4).

Berdasarkan dari artikel berita mengenai suap di lingkungan pemerintahan, bahwa suap merupakan fraud yang hidden sehingga whistleblowing dapat dijadikan langkah awal terungkapnya suap, yang kemudian dapat dilakukan audit forensik selama valid dan relevan, dimana korupsi berupa kasus penyuapan adalah yang paling sering ditemui di Indonesia. Pendeteksian suap menggunakan audit forensik lebih cepat dan mudah karena dalam prosedurnya fokus, terperinci dan rigid. Maka dapat disimpulkan bahwa audit forensik efektif dalam mendeteksi suap dengan dukungan whistleblowing. Suap adalah juga merupakan fraud, sehingga metode yang digunakan untuk mendeteksi fraud pun dapat diterapkan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suap. Diketahui, metode yang dapat mendeteksi fraud dengan cukup akurat menurut (Madzivire et al., 2020) adalah audit forensik.

Dikatakan oleh (Mircheska et al., 2020) audit forensik adalah kegiatan yang meliputi mengoleksi, memverifikasi, memproses, menganalisis dan menyajikan data dalam rangka mengumpulkan kejadian dan bukti nyata dalam bidang sengketa hukum dan keuangan, adanya penyimpangan serta pencegahan fraud. Praktik audit forensik di Indonesia hanya dilaksanakan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki sertifikat Certified Fraud Examiners (CFE) atau Certified Forensic Auditor (CFrA). Penerapan audit forensik yang berlangsung di Indonesiadilaksanakan guna mengetahui adanya fraud, menyelidiki apakah terjadi fraud, ingin

mengetahui ada/tidaknya kerugian finansial dan memberikan kesaksian sebagai pakar.

Menurut ACFE, laporan yang berasal dari whistleblower merupakan sumber yang baik untuk mengcurigai terjadinya fraud dengan angka statistik sebesar 43% pada tahun 2020 (ACFE, 2021). Selain itu, Whistleblowing dapat berkontribusi memperbaiki kualitas dari audit forensik dalam menemukan terjadinya fraud (Panjaitan, 2018). Selanjutnya, salah satu cara agar audit forensik berhasil, yaitu dengan menggunakan bukti dan informasi yang bersumber dari whistleblowing dalam proses pengumpulan dan pembuktian yang nantinya akan digunakan untuk mendeteksi dan mengungkapkan fraud, karena dengan tingginya kasus suap di Indonesia berdasarkan data yang dirilis KPK, maka perlu adanya eksplorasi apakah efektif penerapan audit forensik yang didukung dengan whistleblowing dalam mendeteksi suap. Tinjauan Pustaka Fraud menurut Albrecht et al. Fraud sering juga disebut dengan istilah yang berbeda-beda, yang menggambarkan aktivitas mencuri, menyeroobot, memeras, mengisap, menggelapkan, memalsu dan sebagainya. ACFE mengelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: Penyalahgunaan Aset, Penyalahgunaan atau pencurian harta atau kekayaan yang dalam bahasa hukum disebut sebagai "mengambil" harta dengan cara tidak sah secara hukum.

Selanjutnya, menurut Tuanakotta (2018) korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kedudukan/pangkat pada level pemerintahan (misuse of public office) bagi keuntungan diri sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001) menyatakan bahwa korupsi meliputi segala tindakan yang menentang hukum untuk memperkaya dirinya, orang dan badan lain yang berakibat merugikan kekayaan dan ekonomi.

ANALISIS BERITA MEDIA MASSA

1. IDENTITAS ARTIKEL

Judul Artikel	:	KPK Dorong Anggota G20 Tingkatkan Peran Audit dalam Pemberantasan Korupsi
Publikasi	:	Kompas.com
Tahun	:	2022
Penulis	:	Irfan Kamil
Website	:	https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/11212731/kpk-dorong-anggota-g20-tingkatkan-peran-auditdalam-pemberantasan-korupsi

2. ANALISIS ARTIKEL

(KPK) bakal mendorong negara-negara yang tergabung dalam AntiCorruption Working Group (ACWG) G20 untuk meningkatkan peran audit dalam pemberantasan korupsi (enhancing the role of auditing in tackling corruption). Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar menyatakan, dorongan itu dilakukan dalam rangka peran KPK sebagai ketua atau chair ACWG G20. Menurut dia, peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi akan menjadi topik pembahasan utama dalam dialog antarnegara anggota G20. Lili menyampaikan, KPK selama ini telah berupaya meningkatkan peran audit dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Contohnya, dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPK dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam audit investigatif perkara korupsi yang ditangani KPK. KPK dan BPKP, ujar dia, juga sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) pada awal Januari 2020. Isi MoU itu mencakup 5 poin. Salah satunya, berisi kesediaan BPKP memberi bantuan peningkatan sumber daya manusia (SDM) KPK. Misalnya, berupa bantuan mengenai informasi korupsi, audit investigasi,

bantuan auditor ahli, dan program peningkatan SDM KPK sebagai auditor dengan melakukan diklat auditor di Pusdiklatwas BPKP.

Menurut Lili, proses audit dalam pemberantasan korupsi bukan hanya penting diterapkan di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Hal itu, sebagaimana pernyataan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang menyebutkan, korupsi yang terjadi di sektor publik maupun swasta dapat dideteksi melalui proses audit. Selain pentingnya peran audit dalam pemberantasan korupsi, isu utama lainnya yang akan dibahas ACWG G20 adalah mempromosikan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi. Lili menilai, partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi berperan penting dalam penindakan sekaligus pencegahan korupsi. Selain itu, kata Lili, KPK juga melibatkan masyarakat untuk memantau kualitas pelayanan publik di lingkungan sekitarnya melalui aplikasi Jaringan pencegahan korupsi (JAGA). Melalui platform JAGA yang tersedia dalam bentuk aplikasi dan website, masyarakat dapat bertanya, menyampaikan pendapat, masukan, dan komentar, khususnya pelayanan publik yang tidak sesuai dengan data di JAGA. Sehingga, masyarakat bisa ikut terlibat dalam memantau kualitas dan transparansi pelayanan publik untuk mencegah terjadinya korupsi. Isu berikutnya adalah peningkatan pemberdayaan profesional dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau professional enablers of money laundering.

Berdasarkan isi artikel yang dimuat oleh kompas.com tersebut, bahwasanya praktik- praktik korupsi hampir terjadi di setiap daerah di Indonesia, mulai dari kasus kecil hingga sangat kompleks, misalnya kasus korupsi kecil di tahun 2013, mantan rektor UNSYIAH menjadi tersangka kasus korupsi dana umum beasiswa Universitas Syiah Kuala yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2009-2010 senilai Rp 3,6 miliar (Burhanudin, 2013). Pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan, tetapi harapan untuk menimbulkan efek jera dengan terpenjaranya pelaku koruptor ternyata tidak terjadi. Hal ini disebabkan karena penegakkan hukum di Indonesia tidak bebas dari permainan uang

dan pengaruh kekuasaan. Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sedikit demi sedikit telah memperbaiki citra Indonesia. Objek dari akuntansi forensik di sektor swasta maupun sektor publik adalah skandal keuangan yang menyangkut fraud "penghilangan" aset, seperti pencurian, penyalahgunaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan akuntan forensik yang mempunyai keahlian dalam 4 menginvestigasi indikasi adanya korupsi atau fraud pada perusahaan atau instansi negara.

Dari permasalahan tersebut, peranan audit forensik yang disebut juga audit investigasi dalam upaya penanggulangan korupsi di Indonesia. Akuntan forensik menggunakan pengetahuannya tentang akuntansi, studi hukum, investigasi, dan kriminologi untuk mengungkap fraud, menemukan bukti dan selanjutnya bukti tersebut akan dibawa ke pengadilan jika dibutuhkan (Ramaswamy, 2007). Akuntansi forensik pada awalnya adalah perpaduan paling sederhana antara akuntansi dan hukum (misalnya dalam pembagian harta gono-gini). Berdasarkan pengertian akuntansi forensik tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah keuangan berdasarkan ketentuan hukum. Auditor forensik adalah orang yang menggunakan ilmu akuntansi forensik dengan pertimbangan bahwa tidak semua penggunaannya adalah orang akuntansi (Tias, 2012). Oleh sebab itu, akuntansi forensik sering disebut sebagai audit forensik.

Akuntan forensik dalam pengumpulan bukti audit harus memahami masalah hukum pembuktian. Bukti audit tersebut harus dapat diterima di pengadilan dan cara perolehannya pun tidak boleh melanggar hukum. Beban pembuktian dalam kasus fraud haruslah melampaui keraguan yang layak. Audit forensik merupakan perluasan dari penerapan prosedur audit standar ke arah pengumpulan bukti untuk kebutuhan persidangan di pengadilan.

ANALISIS LAPORAN PEMERIKSAAN AKUNTANSI DARI PERUSAHAAN

1. IDENTITAS LAPORAN AUDIT

Judul	:	Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan entitas anaknya
Website	:	https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202004/20210429170343-245430/YE2020_IFAS_INDO_FINAL_29.pdf

2. ANALISIS LAPORAN AUDIT

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. merupakan bagian dari “Post en Telegraafdienst”, yang dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 dalam Berita Negara Hindia Belanda. Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dilakukan sehubungan dengan adanya kebutuhan Perusahaan untuk menyesuaikan kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan. Usaha Indonesia (“KBLI”) serta untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemandirian Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn.

Perubahan telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada tahun 2020, Perusahaan, sesuai dengan Anggaran Dasar mengubah nama Perusahaan, perubahan susunan pengurus Perusahaan, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika, serta optimalisasi sumber daya. Perusahaan untuk menyediakan barang dan/atau jasa berkualitas tinggi dan kompetitif untuk. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan menjual atau menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan

peraturan perundangan-undangan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan.

Selain itu, perusahaan juga melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

- a) Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi.
- b) Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki.

Perusahaan, yang antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

Perusahaan memiliki beberapa izin penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa dari Pemerintah yang berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas selama Perusahaan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin-izin tersebut. Untuk setiap izin, yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menkominfo”), evaluasi dilakukan setiap tahun dan evaluasi menyeluruh dilakukan setiap lima tahun. Perusahaan wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa berdasarkan izin-izin tersebut diatas setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (“DJPPPI”) sebelumnya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (“DJPT”) pelayanan universal, sementara untuk Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik, Jasa Interkoneksi Internet, dan Jasa Akses Internet terdapat tambahan informasi yang dipersyaratkan seperti kinerja operasi, segmen pelanggan, lalu lintas, dan pendapatan kotor. Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset dan liabilitas keuangan diakui pertama kali pada nilai wajar termasuk biaya transaksi liabilitas keuangan ini selanjutnya diukur pada nilai wajar atau biaya diamortisasi menggunakan. Grup mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, atau (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau Aset keuangan Grup termasuk kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha dan piutang lain- lain, aset keuangan tidak lancar lainnya dan penyertaan tersedia untuk dijual.